

Pengelolaan Pariwisata yang Ramah Lingkungan Berbasis Masyarakat Lokal di Bukit Baranahu

Pelikwan¹, Meycel Pratama², Andika Sanjaya³, Cyntia Lupita Sari⁴

1.2.3.4 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Indonesia.

Email: pelikwan972@gmail.com, meycellpratamaa@gmail.com,
andikapky170@gmail.com, cyntia.lupitasari@fisip.upt.ac.id

Alamat: Yos Sudarso Palangka Raya Kalimantan Tengah, 73111 Kampus

Korespondensi penulis: pelikwan972@gmail.com

Abstract. Sustainable tourism management has become a crucial issue in balancing economic benefits, environmental preservation, and social equity, particularly in local natural destinations. Bukit Baranahu in Central Kalimantan represents a growing rural tourism site that requires integrated and community-based governance to maintain its sustainability. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through field observations, documentation, and limited stakeholder engagement involving local communities, tourism managers, and visitors. The findings indicate that initial efforts toward sustainability have been implemented, including community participation, local economic activities, and basic environmental conservation practices. However, significant challenges persist, particularly in waste management systems, infrastructure adequacy, environmental carrying capacity control, and long-term monitoring mechanisms. The analysis highlights that existing practices remain fragmented and require stronger institutional support and coordination. The study contributes by proposing a collaborative governance framework that integrates local government, community groups, tourism managers, and private stakeholders to enhance sustainability outcomes. Strengthening regulatory frameworks, improving environmental management systems, and fostering community capacity are identified as key strategies to ensure long-term viability of rural-based natural tourism destinations.

Keywords: sustainable tourism; community-based tourism; environmental governance; local empowerment; Bukit Baranahu

Abstrak. Pengelolaan pariwisata berkelanjutan menjadi isu penting dalam menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial, khususnya pada destinasi wisata alam berbasis lokal. Bukit Baranahu di Kalimantan Tengah merupakan destinasi yang berkembang dan memerlukan tata kelola terintegrasi berbasis masyarakat untuk menjaga keberlanjutannya. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan melalui observasi lapangan, dokumentasi, serta keterlibatan terbatas pemangku kepentingan yang meliputi masyarakat lokal, pengelola wisata, dan pengunjung. Temuan menunjukkan adanya upaya awal penerapan prinsip keberlanjutan seperti partisipasi masyarakat, aktivitas ekonomi lokal, dan praktik konservasi lingkungan dasar. Namun demikian, masih terdapat kendala signifikan pada sistem pengelolaan sampah, ketersediaan infrastruktur, pengendalian daya dukung lingkungan, serta mekanisme pemantauan jangka panjang. Analisis menunjukkan bahwa praktik yang ada masih bersifat parsial dan memerlukan penguatan kelembagaan serta koordinasi lintas aktor. Kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan kerangka tata kelola kolaboratif yang mengintegrasikan pemerintah daerah, kelompok masyarakat, pengelola wisata, dan sektor swasta. Penguatan regulasi, perbaikan sistem pengelolaan lingkungan, serta peningkatan kapasitas masyarakat menjadi strategi kunci untuk menjamin keberlanjutan destinasi wisata alam berbasis pedesaan.

Kata kunci: pariwisata berkelanjutan; pariwisata berbasis komunitas; tata kelola lingkungan; pemberdayaan lokal; Bukit Baranahu

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor strategis yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun demikian, perkembangan pariwisata yang tidak terkelola secara berkelanjutan berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan, tekanan terhadap sumber daya alam, serta ketimpangan sosial-ekonomi (Sunaryo, 2013; UNWTO, 2004). Dalam konteks global, konsep pariwisata berkelanjutan berkembang sebagai respons terhadap dampak negatif pariwisata massal yang tidak terencana dengan baik. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap aktivitas pengembangan destinasi wisata. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata yang berbasis keberlanjutan menjadi kebutuhan mendesak, khususnya pada destinasi wisata alam berbasis pedesaan.

Di Indonesia, kebijakan pengembangan pariwisata telah mengarah pada prinsip keberlanjutan yang menekankan partisipasi masyarakat dan pelestarian lingkungan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menegaskan pentingnya asas keberlanjutan, partisipatif, dan keadilan dalam pengelolaan pariwisata. Selain itu, pendekatan *community-based tourism* (CBT) dinilai mampu memperkuat peran masyarakat lokal dalam mengelola potensi wisata sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka (Murphy, 1985; Scheyvens, 1999). Dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Dengan demikian, integrasi antara aspek lingkungan dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama dalam pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan.

Bukit Baranahu di Kalimantan Tengah merupakan salah satu destinasi wisata alam yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Keindahan lanskap alam dan daya tarik wisata berbasis pengalaman menjadikan kawasan ini diminati oleh wisatawan domestik. Namun, pengelolaan yang belum

terstruktur berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti pengelolaan sampah yang kurang optimal, keterbatasan infrastruktur, serta belum adanya pengendalian daya dukung lingkungan secara sistematis. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan praktik pengelolaan yang berlangsung di lapangan. Tanpa intervensi tata kelola yang tepat, keberlanjutan destinasi wisata ini dapat terancam dalam jangka panjang.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan pariwisata berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh sinergi antar pemangku kepentingan melalui pendekatan *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008). Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan pengelola wisata memungkinkan terciptanya sistem pengelolaan yang lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika lokal. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada destinasi wisata berskala besar atau kawasan yang telah berkembang, sehingga kajian pada destinasi lokal berbasis pedesaan masih relatif terbatas. Keterbatasan ini membuka ruang penelitian untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana praktik pengelolaan berkelanjutan diterapkan pada destinasi skala lokal dengan sumber daya yang terbatas. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi dalam mengisi kesenjangan literatur tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Bukit Baranahu dengan menekankan integrasi aspek lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Penelitian ini juga mengkaji bentuk partisipasi masyarakat serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi prinsip keberlanjutan. Selain itu, penelitian ini berupaya merumuskan model tata kelola kolaboratif yang kontekstual dengan kondisi destinasi wisata alam berbasis pedesaan. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka pengelolaan yang mengintegrasikan dimensi ekologis, sosial, dan kelembagaan secara holistik. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena pengelolaan pariwisata di Bukit Baranahu. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, dan praktik sosial yang terjadi dalam konteks pengelolaan destinasi wisata secara alami (Moleong, 2017). Lokasi penelitian berada di kawasan wisata Bukit Baranahu, Kalimantan Tengah, dengan fokus pada interaksi antara pengelola, masyarakat lokal, dan pengunjung. Informan penelitian dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas pariwisata, seperti pengelola wisata, anggota masyarakat lokal, dan wisatawan. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan mampu merepresentasikan kondisi aktual di lapangan secara komprehensif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi fisik kawasan wisata, aktivitas pengelolaan, serta perilaku pengunjung secara langsung. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi terkait pengalaman, persepsi, dan peran masing-masing aktor dalam pengelolaan pariwisata (Sugiyono, 2019). Sementara itu, dokumentasi berupa arsip, foto, dan catatan lapangan digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil temuan. Kombinasi ketiga teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih kaya dan mendalam.



Gambar 1. pohon tumbang menutupi jalan

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994). Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga tahap interpretasi. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data. Selain itu, dilakukan juga pengecekan ulang (member check) kepada informan untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh. Dengan prosedur tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas dan keabsahan yang tinggi.



Gambar 2. tumpukan sampah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Awal Pariwisata Berkelanjutan dan Permasalahan Lingkungan

Implementasi pariwisata berkelanjutan pada destinasi wisata alam berbasis lokal merupakan proses yang kompleks karena melibatkan interaksi antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara simultan. Dalam konteks Bukit Baranahu, pengelolaan yang berjalan saat ini menunjukkan adanya upaya awal untuk mengarah pada prinsip keberlanjutan, meskipun masih dalam tahap yang terbatas dan belum terintegrasi secara sistematis. Prinsip keberlanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan upaya pelestarian lingkungan agar tidak terjadi degradasi dalam jangka panjang (UNWTO, 2004). Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi awal menjadi penting untuk melihat sejauh mana praktik yang ada telah sesuai dengan kerangka pariwisata berkelanjutan. Analisis ini juga menjadi dasar dalam merumuskan perbaikan pengelolaan yang lebih komprehensif.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa pengelola telah menyediakan fasilitas dasar berupa tempat sampah di area pintu masuk kawasan wisata. Langkah ini mencerminkan adanya kesadaran awal terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan dalam aktivitas pariwisata. Dalam literatur, penyediaan fasilitas dasar merupakan salah satu indikator awal dalam implementasi manajemen lingkungan destinasi wisata (Sunaryo, 2013). Namun demikian, keberadaan fasilitas tersebut belum diikuti dengan sistem pengelolaan yang menyeluruh, seperti pengangkutan dan pemrosesan sampah secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi masih bersifat simbolik dan belum mencapai tahap operasional yang efektif.

Selain itu, pengelola juga menerapkan pembatasan pembangunan fasilitas permanen di area puncak bukit sebagai bentuk upaya menjaga keaslian lanskap alam. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip konservasi lingkungan yang menekankan minimalisasi intervensi terhadap ekosistem alami (Inskoop, 1991). Pembatasan pembangunan dapat mencegah kerusakan habitat serta menjaga daya tarik visual yang menjadi nilai utama destinasi wisata alam. Namun, tanpa perencanaan yang terintegrasi, kebijakan ini berpotensi tidak efektif dalam jangka panjang. Diperlukan perencanaan tata ruang yang jelas agar pengembangan tetap terkendali dan sesuai dengan daya dukung lingkungan.

Meskipun terdapat upaya awal tersebut, temuan lapangan menunjukkan adanya permasalahan signifikan dalam pengelolaan sampah di kawasan wisata. Tumpukan sampah masih ditemukan di area puncak bukit, yang menunjukkan ketidakefektifan sistem pengelolaan yang ada. Kondisi ini mengindikasikan bahwa fasilitas yang tersedia belum mampu menjangkau seluruh area aktivitas wisata. Dalam perspektif manajemen lingkungan, pengelolaan sampah yang tidak optimal dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengurangi daya tarik destinasi (Sharpley, 2009). Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Permasalahan tersebut juga berkaitan erat dengan perilaku wisatawan yang belum sepenuhnya sadar terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Tanpa adanya edukasi dan pengawasan yang memadai, wisatawan cenderung mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dalam konteks pariwisata berkelanjutan, perubahan perilaku wisatawan menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan lingkungan (Cohen, 1988). Oleh karena itu, strategi pengelolaan tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas, tetapi juga pada upaya peningkatan kesadaran melalui edukasi dan kampanye lingkungan. Pendekatan ini dapat mendorong partisipasi aktif wisatawan dalam menjaga keberlanjutan destinasi.

Selain faktor perilaku, keterbatasan infrastruktur juga menjadi kendala dalam implementasi pengelolaan lingkungan yang optimal. Akses menuju kawasan puncak yang masih terbatas menyulitkan distribusi fasilitas dan pengangkutan sampah secara rutin. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek infrastruktur memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan destinasi wisata (Gunn, 1994). Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, berbagai upaya pengelolaan akan sulit diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur harus dirancang secara selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Lebih lanjut, belum adanya sistem pengendalian daya dukung lingkungan menjadi tantangan serius dalam pengelolaan Bukit Baranahu. Daya dukung lingkungan merupakan batas maksimal jumlah wisatawan yang dapat ditampung tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan (Butler, 1980). Tanpa pengendalian

yang jelas, peningkatan jumlah wisatawan berpotensi mempercepat degradasi lingkungan dan menurunkan kualitas pengalaman wisata. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan berbasis data dalam mengelola kapasitas kunjungan. Pengelolaan yang adaptif terhadap daya dukung menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan destinasi.

Kondisi implementasi yang masih parsial ini menunjukkan bahwa pengelolaan Bukit Baranahu belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan sistemik dalam pariwisata berkelanjutan. Berbagai upaya yang dilakukan masih berjalan secara terpisah tanpa adanya integrasi yang kuat antar aspek pengelolaan. Dalam literatur, pendekatan sistemik diperlukan untuk memastikan bahwa setiap komponen pengelolaan saling mendukung satu sama lain (Hall, 2008). Tanpa integrasi tersebut, efektivitas pengelolaan akan sulit dicapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kerangka pengelolaan yang lebih terstruktur dan komprehensif.

Secara keseluruhan, implementasi awal pariwisata berkelanjutan di Bukit Baranahu menunjukkan adanya potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Upaya yang telah dilakukan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pengelolaan yang lebih baik di masa depan. Namun, berbagai kendala yang ditemukan menunjukkan perlunya penguatan pada aspek kelembagaan, infrastruktur, dan partisipasi wisatawan. Pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis pada prinsip keberlanjutan menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan keberlanjutan destinasi. Dengan demikian, perbaikan pengelolaan harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Dampak Sosial dan Ekonomi terhadap Masyarakat Lokal

Dampak ekonomi dari pengembangan pariwisata di kawasan Bukit Baranahu menunjukkan adanya kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Kehadiran wisatawan mendorong munculnya aktivitas ekonomi baru seperti warung makan, jasa parkir, dan penjualan produk lokal yang memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat sekitar. Dalam perspektif ekonomi pariwisata, fenomena ini sejalan dengan konsep multiplier effect, di mana aktivitas wisata mampu menggerakkan sektor ekonomi lainnya secara tidak langsung (Sunaryo, 2013). Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya

berdampak pada individu, tetapi juga berpotensi memperkuat ekonomi lokal secara kolektif. Oleh karena itu, pariwisata dapat dipandang sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.

Namun demikian, dampak ekonomi yang muncul masih bersifat informal dan belum terkelola secara optimal dalam kerangka ekonomi berkelanjutan. Sebagian besar usaha yang berkembang masih berskala kecil dan belum memiliki sistem manajemen yang baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Dalam literatur, pengembangan ekonomi lokal berbasis pariwisata memerlukan dukungan kapasitas manajerial dan akses terhadap pasar yang lebih luas (Murphy, 1985). Tanpa adanya penguatan kapasitas tersebut, keberlanjutan ekonomi masyarakat dapat terhambat. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang mampu meningkatkan kualitas pengelolaan usaha lokal.

Selain aspek ekonomi, pariwisata juga memberikan dampak sosial yang signifikan terhadap masyarakat lokal. Interaksi antara wisatawan dan masyarakat membuka ruang pertukaran budaya dan pengetahuan yang dapat memperluas wawasan masyarakat. Proses ini berpotensi meningkatkan keterbukaan sosial serta mendorong adaptasi terhadap perubahan sosial yang terjadi. Dalam konteks pariwisata, interaksi sosial merupakan salah satu faktor penting yang dapat memperkaya pengalaman wisata sekaligus memperkuat hubungan antar budaya (Cohen, 1988). Namun, dinamika ini juga perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan konflik nilai dalam masyarakat. Dengan demikian, dampak sosial pariwisata bersifat ambivalen dan memerlukan pengelolaan yang bijaksana.

Di sisi lain, peningkatan intensitas interaksi dengan wisatawan berpotensi memengaruhi nilai-nilai sosial dan budaya lokal, terutama pada generasi muda. Paparan terhadap budaya luar dapat mendorong perubahan pola perilaku yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai lokal yang telah lama berkembang. Kondisi ini menunjukkan adanya risiko erosi budaya yang dapat mengancam identitas masyarakat setempat. Dalam kajian pariwisata, fenomena ini sering dikaitkan dengan proses komodifikasi budaya yang mengubah nilai budaya menjadi sekadar objek konsumsi wisata (Cohen, 1988). Oleh karena itu, diperlukan strategi

penguatan nilai budaya lokal agar masyarakat tetap memiliki identitas yang kuat di tengah arus perubahan.

Lebih lanjut, keberadaan pariwisata juga berpotensi memperkuat kohesi sosial jika dikelola secara inklusif dan partisipatif. Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pariwisata dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap destinasi wisata serta mendorong solidaritas sosial. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan destinasi juga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan karena didasarkan pada pengetahuan lokal yang kontekstual (Scheyvens, 1999). Namun, tanpa distribusi manfaat yang adil, pariwisata justru dapat memicu ketimpangan sosial di dalam masyarakat. Oleh karena itu, aspek keadilan sosial perlu menjadi perhatian dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas.

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang memengaruhi optimalisasi dampak sosial dan ekonomi pariwisata. Masyarakat lokal masih memerlukan peningkatan keterampilan dalam bidang pelayanan wisata, manajemen usaha, dan pemasaran. Tanpa dukungan peningkatan kapasitas, masyarakat akan sulit bersaing dan memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia. Dalam konteks *community-based tourism*, penguatan kapasitas masyarakat merupakan elemen kunci dalam mencapai keberlanjutan (Scheyvens, 1999). Oleh karena itu, program pelatihan dan pendampingan menjadi kebutuhan penting dalam pengembangan destinasi wisata.

Selain itu, belum adanya sistem kelembagaan yang kuat juga menjadi kendala dalam pengelolaan dampak sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Kelembagaan lokal seperti kelompok sadar wisata (Pokdarwis) memiliki peran strategis dalam mengorganisasi masyarakat dan mengelola aktivitas pariwisata. Namun, peran ini belum berjalan secara optimal karena keterbatasan dukungan dan koordinasi antar pihak. Dalam literatur, kelembagaan yang kuat menjadi prasyarat penting dalam menciptakan tata kelola pariwisata yang efektif dan berkelanjutan (Hall, 2008). Oleh karena itu, penguatan kelembagaan lokal perlu menjadi prioritas dalam pengembangan destinasi.

Secara keseluruhan, dampak sosial dan ekonomi pariwisata di Bukit Baranahu menunjukkan potensi yang besar sekaligus tantangan yang perlu diatasi. Pariwisata

telah memberikan manfaat ekonomi yang nyata, tetapi masih memerlukan pengelolaan yang lebih terstruktur untuk memastikan keberlanjutannya. Di sisi sosial, interaksi yang terjadi membawa peluang sekaligus risiko terhadap keberlangsungan nilai budaya lokal. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang antara pengembangan ekonomi dan pelestarian sosial budaya menjadi sangat penting. Dengan pengelolaan yang tepat, pariwisata dapat menjadi instrumen pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

Kebutuhan Model Tata Kelola Kolaboratif

Kebutuhan akan model tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan pariwisata di Bukit Baranahu menjadi semakin penting seiring dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Pengelolaan destinasi wisata tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu aktor saja, melainkan memerlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, pendekatan collaborative governance menawarkan kerangka kerja yang memungkinkan terjadinya koordinasi dan kerja sama lintas sektor secara efektif (Ansell & Gash, 2008). Kolaborasi ini mencakup keterlibatan pemerintah, masyarakat lokal, pengelola wisata, dan sektor swasta dalam satu sistem pengelolaan yang terintegrasi. Dengan demikian, tata kelola kolaboratif menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.

Peran pemerintah daerah dalam model tata kelola kolaboratif sangat krusial, terutama dalam penyusunan regulasi dan penyediaan infrastruktur pendukung. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang mengatur pengelolaan destinasi wisata agar sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas dasar seperti akses jalan, sarana kebersihan, dan sistem pengelolaan lingkungan. Dalam literatur, peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pariwisata yang efektif (Hall, 2008). Tanpa dukungan kebijakan yang jelas, upaya pengelolaan yang dilakukan oleh aktor lain akan sulit berjalan secara optimal.

Di sisi lain, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) memiliki peran strategis sebagai pengelola operasional di tingkat lokal. Pokdarwis bertanggung jawab dalam

mengatur aktivitas wisata sehari-hari, termasuk pengelolaan tiket, kebersihan kawasan, dan pelayanan kepada pengunjung. Keterlibatan Pokdarwis memungkinkan pengelolaan yang lebih responsif terhadap kondisi lapangan karena berbasis pada pengetahuan lokal. Dalam konteks *community-based tourism*, keberadaan kelembagaan lokal seperti Pokdarwis menjadi elemen penting dalam memastikan partisipasi masyarakat secara aktif (Murphy, 1985). Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan kelembagaan Pokdarwis menjadi kebutuhan yang mendesak.

Masyarakat lokal juga memegang peran penting sebagai aktor utama dalam pengembangan ekonomi berbasis pariwisata. Keterlibatan masyarakat tidak hanya terbatas pada aktivitas ekonomi, tetapi juga dalam menjaga kelestarian lingkungan dan nilai-nilai budaya lokal. Partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap destinasi wisata sehingga mendorong upaya pelestarian yang lebih berkelanjutan. Dalam literatur, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan pariwisata berkelanjutan (Scheyvens, 1999). Namun, tanpa dukungan yang memadai, partisipasi masyarakat berpotensi bersifat pasif dan tidak optimal.

Sektor swasta turut berperan dalam mendukung pengembangan destinasi melalui investasi dan inovasi, khususnya dalam bidang promosi dan pengembangan fasilitas wisata. Keterlibatan sektor swasta dapat mempercepat pertumbuhan destinasi serta meningkatkan daya saing di pasar pariwisata. Selain itu, sektor swasta juga dapat berkontribusi dalam penerapan teknologi dan strategi pemasaran digital yang lebih efektif. Dalam perspektif pembangunan pariwisata, kemitraan antara sektor publik dan swasta menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi (Inskeep, 1991). Namun demikian, keterlibatan sektor swasta perlu diatur agar tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Meskipun setiap aktor memiliki peran masing-masing, koordinasi antar pemangku kepentingan masih menjadi tantangan utama dalam implementasi tata kelola kolaboratif. Kurangnya komunikasi dan pembagian peran yang jelas dapat menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan inefisiensi dalam pengelolaan. Kondisi

ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif memerlukan mekanisme koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Dalam teori collaborative governance, keberhasilan kolaborasi sangat ditentukan oleh adanya kepercayaan, komunikasi, dan komitmen antar aktor (Ansell & Gash, 2008). Oleh karena itu, penguatan mekanisme koordinasi menjadi hal yang sangat penting.

Selain itu, belum adanya kerangka kelembagaan yang formal juga menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola kolaboratif yang efektif. Tanpa struktur kelembagaan yang jelas, koordinasi antar aktor cenderung bersifat informal dan tidak berkelanjutan. Hal ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan program pengelolaan destinasi. Dalam literatur, kelembagaan yang kuat menjadi prasyarat utama dalam menciptakan tata kelola yang stabil dan berkelanjutan (Hall, 2008). Oleh karena itu, pembentukan kelembagaan formal yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan menjadi langkah yang diperlukan.

Pengembangan model tata kelola kolaboratif juga perlu didukung oleh sistem perencanaan yang berbasis data dan partisipatif. Perencanaan yang melibatkan seluruh aktor akan menghasilkan kebijakan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, penggunaan data dalam perencanaan dapat meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan serta meminimalkan risiko kesalahan kebijakan. Dalam konteks pariwisata berkelanjutan, perencanaan yang berbasis data dan partisipasi menjadi kunci dalam menciptakan pengelolaan yang adaptif terhadap perubahan (UNWTO, 2004). Oleh karena itu, integrasi antara data dan partisipasi menjadi elemen penting dalam tata kelola kolaboratif.

Secara keseluruhan, kebutuhan akan model tata kelola kolaboratif di Bukit Baranahu merupakan konsekuensi dari kompleksitas pengelolaan destinasi wisata yang melibatkan berbagai kepentingan. Kolaborasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, pengelola, dan sektor swasta dapat menciptakan sistem pengelolaan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Namun, berbagai tantangan seperti lemahnya koordinasi, keterbatasan kelembagaan, dan kurangnya perencanaan berbasis data masih perlu diatasi. Oleh karena itu, penguatan tata kelola kolaboratif harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan demikian, destinasi

wisata Bukit Baranahu dapat berkembang secara optimal tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata di Bukit Baranahu telah mengarah pada prinsip keberlanjutan melalui inisiatif awal seperti partisipasi masyarakat, pembatasan pembangunan, dan penyediaan fasilitas dasar, namun implementasinya masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistematis. Temuan mengindikasikan bahwa permasalahan utama terletak pada lemahnya pengelolaan lingkungan, keterbatasan infrastruktur, belum adanya pengendalian daya dukung, serta belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam kerangka tata kelola kolaboratif. Dampak ekonomi telah dirasakan masyarakat, tetapi belum didukung oleh kapasitas dan kelembagaan yang memadai, sementara aspek sosial menunjukkan potensi sekaligus risiko terhadap keberlanjutan nilai budaya lokal. Oleh karena itu, penguatan tata kelola kolaboratif berbasis koordinasi lintas aktor, didukung regulasi yang jelas dan kelembagaan yang kuat, menjadi kebutuhan mendesak. Prioritas perbaikan diarahkan pada pengembangan sistem pengelolaan lingkungan terpadu, peningkatan kapasitas masyarakat, penyusunan kebijakan berbasis data termasuk daya dukung kawasan, serta optimalisasi peran Pokdarwis dan sektor swasta dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, keberlanjutan destinasi wisata alam berbasis pedesaan dapat terjaga secara lebih efektif dan berjangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Becherel, L., & Vellas, F. (2008). *Pemasaran pariwisata internasional*. Yayasan Obor Indonesia.
- Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. *The Canadian Geographer*, 24(1), 5–12.
- Cohen, E. (1988). Authenticity and commoditization in tourism. *Annals of Tourism Research*, 15(3), 371–386.

- Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2008). *Tourism: Principles and practice*. Pearson Education.
- Damanik, J., & Weber, H. F. (2006). *Perencanaan ekowisata: Dari teori ke aplikasi*. Andi.
- Fandeli, C. (2000). *Pengusahaan ekowisata*. Fakultas Kehutanan UGM.
- Gunn, C. A. (1994). *Tourism planning: Basics, concepts, cases*. Taylor & Francis.
- Hall, C. M. (2008). *Tourism planning: Policies, processes and relationships*. Pearson Education.
- Honey, M. (2008). *Ecotourism and sustainable development: Who owns paradise?* Island Press.
- Inskoop, E. (1991). *Tourism planning: An integrated and sustainable development approach*. Van Nostrand Reinhold.
- Lane, B. (2009). Rural tourism: An overview. In T. Jamal & M. Robinson (Eds.), *The SAGE handbook of tourism studies*. SAGE Publications.
- Middleton, V. T. C., & Clarke, J. (2001). *Marketing in travel and tourism*. Butterworth-Heinemann.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Murphy, P. E. (1985). *Tourism: A community approach*. Routledge.
- Pitana, I. G., & Diarta, I. K. S. (2009). *Pengantar ilmu pariwisata*. Andi.
- Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management*, 20(2), 245–249.
- Sharpley, R. (2009). *Tourism development and the environment: Beyond sustainability?* Earthscan.
- Spillane, J. J. (1994). *Ekonomi pariwisata: Sejarah dan prospeknya*. Kanisius.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Suwantoro, G. (2004). *Dasar-dasar pariwisata*. Andi.
- Timothy, D. J., & Olsen, D. H. (2006). *Tourism, religion & spiritual journeys*. Routledge.
- Tjiptono, F. (1997). *Strategi pemasaran* (Edisi ke-2). Andi.
- United Nations Environment Programme, & World Tourism Organization. (2005). *Making tourism more sustainable: A guide for policy makers*. UNEP & UNWTO.

- World Tourism Organization. (2004). *Indicators of sustainable development for tourism destinations: A guidebook*. UNWTO.
- World Tourism Organization. (2018). *Tourism for development: Volume I—Key areas for action*. UNWTO.
- Yoeti, O. A. (2008). *Perencanaan dan pengembangan pariwisata*. PT Pradnya Paramita.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020). *Strategi nasional pengelolaan sampah*.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2021). *Pedoman desa wisata berkelanjutan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.